



Tagihan Tertunggak Rp7 Miliar

● Sambungan Hal 1

hingga masih ada tunggakan sekitar Rp7 miliar yang belum turun. "Jadi Rp8,6 miliar itu total klaim yang kami ajukan. Dari jumlah tersebut, baru dibayar uang mukanya Rp1,6 miliar oleh Kemenkes," terang Yunita, Jumat (16/10).

Menurutnya, sesuai prosedur, anggaran penanganan virus corona itu diajukan oleh pihak rumah sakit pada BPJS untuk diverifikasi. Setelah dinyatakan terverifikasi, maka pihak Kemenkeslah yang mencairkan penggantian biaya untuk fasilitas kesehatan (faskes) yang telah mengajukan klaim.

"Kami sudah komunikasi dan konfirmasi ke BPJS, terakhir bulan Oktober 2020 ini. Sampai kita konfirmasi ulang, ya, kemudian mendapat informasi kalau ada berkas yang *dispute*, sehingga belum bisa turun," jelasnya.

Klaim yang belum dibayarkan pemerintah pusat ter-

sebut, otomatis berdampak langsung pada operasional RSUD Kota Yogyakarta yang harus melakukan efisiensi pendapatannya. Padahal, semenjak pandemi melanda, jumlah pasien noncorona di RS pelat merah ini mengalami penurunan.

"Dampak riilnya pada penurunan pendapatan. Pasien yang datang ke RSUD kan menurun karena dampak Covid-19. Tapi, di sisi lain pasien Covid-19 memerlukan biaya yang tinggi, sementara klaim tidak segera cair," lanjut Yunita. "Namun, kita masih bisa bersyukur karena ada dana dari APBD (Kota Yogyakarta), serta dukungan dari anggaran belanja tidak terduga," pungkasnya.

Jalan normal

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan operasional RSUD Kota Yogyakarta berjalan normal meski klaim penanganan Covid-19 dengan jumlah sekitar Rp8,6 miliar baru dicairkan Rp1,6 miliar saja oleh Kemenkes.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi men-

jelaskan, pihaknya harus tetap menjamin pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Apalagi, sampai sejauh ini, kasus Covid-19 di kota pelajar belum sepenuhnya berakhir, meski sudah mengalami sedikit pelandaian. "Ya, ini memang proses yang menjadi kewajiban kita untuk melayani warga, terkait pelayanan langsung penanganan Covid-19 khususnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan operasional RSUD Kota Yogyakarta, Pemkot pun harus mengalokasikan anggaran APBD, sehingga piutang dari pemerintah pusat tersebut dapat tertutup. Akan tetapi, Heroe berharap, supaya Kemenkes segera menutup tunggakkannya.

"Kita bisa saja menalangi sementara untuk penanganannya. Misal melalui DTT (Dana Tidak Terduga), itu memungkinkan. Tapi, harapan kami, apa yang jadi kewajiban pemerintah pusat itu bisa terselesaikan," ungkapnya.

Sehingga pengalokasian anggaran Pemkot Yogyakarta pun bisa dimaksimalkan. Pasalnya, meski masih me-

ungkinkan, pemanfaatan DTT yang sejatinya untuk menangani persoalan lain yang lebih mendesak dapat terganggu, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa mendatang.

"Meski DTT masih ada anggaran, tapi sebenarnya itu kan untuk mengantisipasi kalau ada kejadian di kemudian hari. Kita kan ada batasan-batasannya, ya, apa yang bukan jadi kewenangan kita," tandas Heroe. "Apa yang disampaikan RSUD itu kan memang biaya yang menjadi tanggungan pemerintah pusat, bukan kewenangan daerah. Tapi, sementara operasional rumah sakit tetap kita *back up*, agar penanganannya tak sampai terlantar, bisa berjalan normal," tambahna.

Walau begitu, pria yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta tersebut meyakini, pemerintah pusat segera menyelesaikan tunggakkannya dalam waktu dekat. "Kami yakin terselesaikan segera, karena sudah menjelang akhir tahun juga ini," pungkas Heroe. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. RSUD (RS Jogja)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005